

BAB III

DINAMIKA HUBUNGAN HANKAM AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA

A. Masa Awal Kemerdekaan Indonesia

Pada tahun 1945 hingga 1967 adalah salah satu masa paling kelam dalam sejarah Indonesia. Pada masa ini terjadi "Agresi Militer" yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia. Belanda merupakan salah satu sekutu Amerika Serikat, oleh karena itu Amerika Serikat membantu kepentingan Belanda di wilayah Hindia Belanda. Hubungan AS dan Belanda di Indonesia sudah terjalin sejak lama. Pada tahun 1942 semasa Perang Dunia II, sekutu membentuk komando gabungan dengan nama ABDACOM (*American Dutch Australian Command*).

Komando gabungan ini dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Wavell dan berpusat di Bandung. Komando ini bertugas untuk menghadapi Jepang di wilayah Hindia Belanda. Jepang menjadi anggota aliansi "POROS ROBERTO" bersama NAZI Jerman, dan Italia selama Perang Dunia II berlangsung antara tahun 1939 hingga 1945. Doel, seorang sejarawan asal Belanda menyebutkan bahwa sejak tahun 1920 Washington menyokong praktek kolonialisme Belanda di kepulauan Indonesia. Washington berkomitmen untuk melindungi kepentingan AS dan sekutu-sekutunya sebagai salah satu prinsip kebijakan luar negeri

Amerika Serikat. Pada tahun 1939, Belanda memasok lebih dari setengah

konsumsi total bahan mentah yang penting bagi Amerika Serikat, sehingga Belanda merupakan salah satu sekutu penting bagi Amerika Serikat.⁴⁷

Pasca Perang Dunia II, kondisi politik Eropa masih terguncang akibat hancurnya perekonomian negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia II. Kondisi tersebut diperburuk oleh persaingan ideologi besar saat itu yaitu kapitalisme dan komunisme. Kedua ideologi tersebut mempunyai cara pandang yang berbeda mengenai cara membangun kembali Eropa yang porak poranda akibat Perang Dunia II. Kemunculan partai-partai komunis di Eropa, mendorong Amerika Serikat menyokong penuh sekutu-sekutunya termasuk kepentingan Belanda di wilayah kepulauan Indonesia. Pada tahun 1946 Amerika memberikan bantuan keuangan kepada Belanda melalui program “*Marshall Plan*” (semacam IMF untuk negara-negara Eropa yang terkena dampak dari PD II).

Washington mendukung upaya Belanda dalam melancarkan agresi militer ke wilayah Hindia Belanda. Dukungan yang diberikan Amerika Serikat terhadap Belanda berupa pinjaman finansial, pinjaman peralatan tempur, dan dukungan politis. Amerika Serikat memberikan pinjaman finansial melalui Badan Administrasi Aset Perang (*War Assets Administration*) sebesar US\$ 26.000.000 kepada Belanda. Dana sebesar itu digunakan untuk membeli senjata dan amunisi oleh Belanda dengan guna melengkapi personel militer dalam agresi militer ke Hindia Belanda. Amerika Serikat memberikan pinjaman beberapa peralatan

⁴⁷ Terri Cavanagh, “Pelajaran-Pelajaran Dari Kudeta 1965 Indonesia”, <<http://www.wsws.org/exhibits/1965coup/coup1965.shtml>>, diakses tanggal 8 Agustus 2012.

tempur dari armada tempur AS yang telah dihapus segala atribut dan identitas militer yang berkaitan dengan Amerika Serikat. Persenjataan yang diberikan oleh AS melalui program pinjaman peralatan tempur antara lain: 118 pesawat tempur yang terdiri dari B-25, P-40 dan P-51 Mustang, 45 unit tank Stuart, 459 jip militer, 170 unit artileri, ribuan persenjataan infantri, ratusan truk angkut personel, dan logistik perang dari wilayah Asia-Pasifik.⁴⁸ Amerika Serikat memberikan dukungan politis berupa pemboikotan keanggotaan Republik Indonesia dalam komisi ekonomi PBB untuk Asia Timur (ECAFE). Ketiga bantuan inilah yang menjadi peran sentral Amerika Serikat melaksanakan prinsip kebijakan luar negerinya. Karakter Amerika Serikat yang pragmatis mulai tampak pada masa ini. AS membantu persenjataan militer Belanda di satu sisi, sedangkan di sisi lain AS menunjukkan sikap netral dalam perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Hal ini ditunjukkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Dean Acheson melakukan intervensi terhadap agresi militer Belanda.

B. Masa Perang Dingin (1947-1991)

Peningkatan eskalasi perang ideologis di Eropa telah menjalar ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Pemerintahan Presiden Soekarno mulai merapat ke pihak Uni-Soviet dan kegagalan agresi militer II Belanda telah

⁴⁸ "Army Surplus Property Disposal" (Lacey to Graham) 13 October 1947, RG59, PSA, Box No.4,NARA; "American Military Assistance to the Netherlands during Indonesian Struggle for Independence, 1945-1949" *25. Indonesia and the United States: A Military and Strategic History* volume 2, Carol D.

memicu AS untuk merubah kebijakan luar negerinya terhadap Republik Indonesia. Perubahan tersebut digunakan AS untuk membendung pengaruh “Komunisme” di Indonesia. Perubahan sikap ini ditandai dengan delegasi Amerika Serikat dalam forum Dewan Keamanan PBB tanggal 27 Desember 1949 secara terbuka meminta Belanda menyerahkan kepulauan Indonesia kepada pemerintah Presiden Soekarno.

Dukungan Amerika Serikat kepada kemerdekaan Republik Indonesia dengan harapan dapat mendirikan pos kekuatan baru yang dapat diandalkan untuk meredam pengaruh ideologi komunis di wilayah Asia. Namun usaha AS menjadi sia-sia setelah Soekarno-Hatta mengambil kebijakan luar negeri yang revolusioner melalui politik luar negeri “bebas-aktif” dan membentuk Gerakan Non-Blok. Kekecewaan Amerika Serikat memuncak setelah Soekarno secara sepihak mengambil kebijakan untuk merangkul komunisme pada september 1950, dengan alasan menjaga stabilitas politik.⁴⁹ Kebijakan Presiden Soekarno yang berpihak ke Uni Soviet mencapai puncak saat mengumumkan kebijakan Poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang.⁵⁰

Kondisi ini mendorong Amerika Serikat melalui C.I.A melakukan pendekatan kepada TNI AD yang memang sejak awal lebih condong memihak Amerika Serikat. Hubungan mesra Amerika Serikat dengan TNI AD

⁴⁹ "US Tries to Call Black Account on Indonesian Killings" (International Herald Tribune 30 July 2001), George Lardner Jr.; "Role of CIA in the coup of 30 September 1965" FRUS volume 26 (2001).

⁵⁰ *Card 17*, Paul C. 1997. *Shamed Honor Separate Fears: Fifty Years of U.S. Indonesian Relations*.

dimanfaatkan oleh pihak AS untuk mengkuudeta Presiden Soekarno. Hal tersebut dilakukan untuk memutus rantai komunis di Indonesia. Amerika Serikat tetap memberikan bantuan militer kepada TNI AD terutama Kopassus. Bantuan militer AS atau *U.S Security Assistance* diberikan kepada Indonesia berupa IMET (*International Military Education Training*) dan MAP (*Military Assistance Program*). Bantuan militer ini diberikan oleh Amerika Serikat sejak tahun 1950 hingga tahun 1964.⁵¹ Bantuan MAP yang diterima oleh Indonesia mencapai US\$ 13.000.00 setiap tahunnya.⁵² Bantuan ini diberikan oleh AS dalam bentuk peralatan logistik tempur, sistem komunikasi, dan peralatan tempur.

Keselarasan kepentingan nasional yang dibangun antara Amerika Serikat dengan Indonesia dalam membendung pengaruh komunis, hal ini membuat AS memberikan dukungan dalam bentuk *U.S. Security Assistance* yang merupakan dukungan politis sekaligus dalam bentuk dukungan perlengkapan militer. *Security Assistance* yang diberikan kepada Indonesia pada dasarnya diberikan dalam rangka penerapan kebijakan pembendungan (*policy of containment*). Kebijakan ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara doktrin pembendungan (*containment doctrine*)⁵³ dengan modifikasi program bantuan "*Marshall Plan*".⁵⁴

⁵¹ Indonesia: *Foreign Military Relations*, < <http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-6353.html>>, diakses tanggal 10 Agustus 2012.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Containment Doctrine* merupakan bagian dari kebijakan luar negeri AS yang diterapkan pada era Perang Dingin, dimana AS berupaya membendung pengaruh komunis yang disebarkan oleh Soviet. Penyebaran komunis bagi AS merupakan musuh demokrasi yang harus diperangi. Doktrin ini lahir (1947) pada saat pemerintahan Presiden Harry Truman, dimana doktrin ini disarankan oleh George Kennan, seorang diplomat yang pernah bertugas di Soviet, yang kemudian menjadi pejabat Deputy

Dalam mekanismenya *U.S. Security Assistance* dilakukan melalui prosedur yang diusulkan oleh *U.S. Department of Defense* (Departemen Pertahanan Amerika Serikat) kepada Komisi Hubungan Luar Negeri Kongres AS. Salah satu persyaratan pokok yang ditetapkan oleh Kongres AS adalah bahwa bantuan tersebut benar-benar digunakan dalam rangka membantu negara berkembang yang berjuang melawan komunisme. Persyaratan pokok lainnya adalah *U.S. Security Assistance* tidak akan diberikan kepada negara-negara yang terindikasi terlibat dalam pelanggaran HAM.

Pada 15 Agustus 1950 terjadi peristiwa yang memalukan bagi pemerintah AS. Hatta-Cochran melakukan perjanjian rahasia berupa bantuan militer untuk personel kepolisian Indonesia dalam bentuk program US MAP (*Military Assistance Program*). Perjanjian ini kemudian dikenal sebagai "*Cochran Affair*"⁵⁵, sebagai salah satu upaya AS membendung pengaruh komunis di Indonesia. Bantuan IMET yang diberikan oleh AS telah melatih 4.000 personel Kopassus TNI AD.⁵⁶ Pada 13 Agustus 1958 Indonesia menerima bantuan kredit peralatan tempur dari Amerika Serikat dalam bentuk FMS (*Foreign Military*

⁵⁴ *Marshall Plan* merupakan program bantuan ekonomi yang awalnya dirancang bagi negaranegara Eropa Barat yang ditujukan untuk pembenahan sektor industri yang hancur akibat terjadinya PD II.

⁵⁵ *Cochran Affair* adalah sebuah peristiwa yang telah mempermalukan pemerintah AS, yang disebabkan oleh terungkapnya sebuah perjanjian rahasia antara Dubes AS (H Merle Cochran) dan Hatta berupa pemberian bantuan kepolisian/peralatan militer yang dikenal dengan *U.S. Military Assistance Program* (US MAP). Perjanjian tersebut pada saat diungkap oleh Kabinet Sukiman untuk memperoleh persetujuan/ratifikasi Parlemen Indonesia ternyata ditolak. Istilah *Cochran Affair* dimunculkan oleh Ida Anak Agung Gde Agung yang menjabat Menlu RI pada tahun 1955 – 1956, dan dikutip dari tulisan Timo Kivimaki dalam bukunya yang berjudul *US-Indonesian Hegemonic Pursuing Strength of Weakness: US Foreign Policy and Conflict in the Islamic World* (London:

Sales) senilai US\$7.300.000.⁵⁷ Nilai bantuan tersebut meningkat menjadi US\$22.000.000 pada tahun 1959 dan 1960.⁵⁸ Pada tahun 1965 dan 1966 bantuan tersebut dihentikan akibat hubungan politik yang memanas antara AS dengan Soekarno. Namun kebijakan Presiden Soekarno yang memilih condong ke Kremlin, memberikan keuntungan bagi militer Indonesia. Pemerintahan Uni Soviet di bawah kepemimpinan Khurscev memberikan bantuan berupa kontrak pengadaan perlengkapan militer senilai US\$ 600.000.000.⁵⁹ Bantuan militer Soviet tersebut diberikan kepada Indonesia setelah proposal pengadaan peralatan militer yang diajukan oleh KASAD Jenderal A.H. Nasution ditolak oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Amerika Serikat merasa khawatir jika peralatan militernya digunakan untuk melawan Belanda dalam Konflik Indonesia-Belanda terkait masalah Irian Barat.⁶⁰ Amerika Serikat memilih netral dalam konflik Irian Barat. Amerika Serikat tidak menjual senjatanya kepada kedua belah pihak yang bertikai.

Setelah krisis Irian Barat berakhir, Amerika kembali memberikan bantuan militer kepada Indonesia dalam rangka mempersempit pengaruh Uni Soviet. Bantuan militer yang diberikan AS kepada Indonesia senilai US\$93.000.000.

⁵⁷ American Embassy & Deplu RI, "Exchange of Notes: Sale of Military Equipment, Materials, and Services" August 13, 1958, TIAS no. 4095, *U.S. Treaties and Other International Agreements*, 1150

Nilai tersebut jauh lebih kecil daripada bantuan militer yang diberikan Uni Soviet pada periode yang sama sebesar US\$1,3 miliar.⁶¹

Bantuan militer yang diberikan kepada Indonesia tidak terlepas dari adanya kekhawatiran yang semakin meningkat dari pihak AS. Kekhawatiran yang berlebihan ini bahkan membuat Amerika Serikat melakukan tindakan yang tidak terpuji. Pada tahun 1958 Amerika Serikat melalui badan FBI dan CIA mengerahkan operasi rahasia yang dilakukan dalam rangka mendukung aksi anti komunis yang dilakukan oleh Perdana Menteri PRRI Syarifudin Prawira Negara dan Permesta yang berusaha menjatuhkan pemerintahan Soekarno yang dinilai pro-komunis. Namun kedua usaha tersebut mengalami kegagalan karena tidak didukung oleh TNI AD di bawah kepemimpinan Jenderal A.H Nasution.⁶²

Upaya Amerika Serikat untuk melakukan kudeta terhadap pemerintah Presiden Soekarno terjadi lagi pada masa pemerintahan Presiden Lyndon Johnson. Presiden Lyndon Johnson memerintahkan kepada CIA (*Central Intelligence Agency*) untuk melancarkan operasi rahasia "*black ops*".⁶³ Operasi ini mempunyai tugas utama menggulingkan pemerintahan resmi Presiden Soekarno melalui kudeta militer yang dieksekusi pada tanggal 30 September 1965. Gerakan ini dikenal oleh masyarakat sebagai "GESTAPU" (Gerakan

⁶¹ *Ibid*, hlm. 178-179.

⁶² Kivimaki, Timo, 2003, *US-Indonesian Hegemonic Bargaining Strength of Weakness: US Foreign Policy and Conflict in the Islamic World*, London: Ashgate, hlm.114 – 115.

⁶³ *Black Ops* adalah *Joint Operation* (operasi gabungan) antara Pentagon dan CIA, yang memiliki tugas paling vital dan strategis dalam hierarki intelijen di Amerika, dengan misi-misi yang diembankan antara lain: pembunuhan kepala negara, mengorkestrasi kudeta, mengatur pemilihan umum, propaganda dan perang intelijen, semua dengan satu tujuan: yakni untuk pelestarian kepentingan Amerika Serikat di dunia ini.

September Tiga Puluh). Washington disebutkan melakukan transfer dana sebesar 1.100.000 dollar Amerika ke beberapa petinggi militer TNI AD untuk mengkoordinir operasi paramiliter melakukan eksekusi berdarah.⁶⁴ Peristiwa ini menyisakan seorang Letjend TNI Soeharto. Soeharto mengambil tampuk kepemimpinan Indonesia menjadi Presiden menggantikan Soekarno. Peristiwa Gestapu menjadi tonggak dimulainya masa Orde Baru. Amerika Serikat sempat terperangah atas perubahan situasi sosial-politik yang terjadi begitu cepat di Indonesia. AS segera mengambil kebijakan untuk memulihkan hubungan militer dengan Indonesia. Presiden Nixon tidak ingin kehilangan momentum untuk menjaga hubungan hankam dengan Indonesia dan tidak akan membiarkan Indonesia merapat ke negara Uni Soviet.

Semasa pemerintahan Presiden Soeharto yang mengambil posisi Presiden Soekarno memulai babak baru hubungan hankam dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat melalui program *Military Assistance Program* (MAP) memulai kembali hubungan hankam dengan Indonesia pada awal masa Orde Baru. Pada tahun anggaran 1971, Amerika Serikat memberikan bantuan berupa peralatan, biaya perawatan dan pelatihan militer kepada Indonesia senilai US\$ 18.000.000. Nilai bantuan MAP untuk Indonesia ditingkatkan menjadi US\$25.000.000 pada tahun anggaran 1972. Namun sebagian dari dana tersebut digunakan oleh Indonesia untuk membeli *military hardware* dari Uni Soviet. Pada April 1972

⁶⁴ "US Tries to Call Black Account on Indonesian Killings" (*International Herald Tribune* 30 July 1965).

Amerika Serikat meminta persetujuan kepada kongress untuk memberikan bantuan MAP kepada Indonesia senilai US\$29.900.000 pada tahun anggaran 1973.⁶⁵

Pada Agustus 1975 terjadi gejolak politik di wilayah Timor Portugis (Timor-Timur) yang memaksa Indonesia untuk turut campur tangan di wilayah tersebut. Upaya tersebut mendapat dukungan politik dan militer dari Amerika Serikat. AS mendukung langkah Indonesia menyerang rejim Fretilin komunis yang dideklarasikan sepihak di wilayah Timor Timur dengan tujuan membendung pengaruh komunis di Asia Tenggara. Namun pemerintah Amerika Serikat melalui menteri luar negerinya Henry Kissinger, pemerintah AS melarang Indonesia menggunakan senjata-senjata buatan AS. Dalam kenyataannya, pemerintah AS tidak mencegah Kopassus menggunakan senjata-senjata buatan AS. Kenyataan itu tidak membuat Kongress AS merasa gusar atas tindakan pemerintah AS yang memberikan dukungan politik dan senjata kepada militer Indonesia.⁶⁶ Peristiwa terjadi pada masa perang dingin sehingga AS memiliki kepentingan terhadap nasib Timor Portugis. Perhatian tersebut ditanggapi secara serius oleh Presiden Soeharto yang ingin mengintegrasikan Timor Portugis ke dalam wilayah NKRI. Hal ini terwujud setelah pasukan militer

⁶⁵ Pauker et. al., 1973, *In Search of Self-Reliance: U.S. Security Assistance to the Third World Under*

berhasil mengalahkan Fretilin dan merebut Timor Portugis. Indonesia mengganti nama Timor Portugis menjadi Timor Timur.

Pada tahun 1976, Kongres melihat adanya indikasi pelanggaran HAM saat penyerangan Militer Indonesia terhadap Timor Timur, sehingga dana bantuan militer yang sedianya berjumlah US\$4,8 milyar akhirnya hanya berjumlah US\$19,4 juta ditambah dengan kredit FMS (*Foreign Military Sales*) sebesar US\$23,1 juta dan bantuan IMET sebesar US\$2 juta serta bantuan dalam bentuk EDA (*Excess Defense Articles*) sebesar US\$13 juta.⁶⁷

Pada tahun 1979 saat Menhan AS Harold Brown menyampaikan proposal di depan Kongres, bantuan IMET yang telah diberikan kepada Indonesia sebesar US\$1,973,000 namun dalam pelaksanaannya terserap sebesar US\$1,848,000 dengan jumlah personil TNI yang mengikuti program IMET sebanyak 195 orang. Sementara realisasi dari program yang dilaksanakan pada tahun 1980 adalah sebesar US\$1,874,000 hal ini ternyata lebih besar dari yang direncanakan yaitu sebesar US\$1,639,000. Namun jumlah personel yang dikirim mengikuti program IMET mengalami pengurangan yaitu hanya sejumlah 173 orang.⁶⁸

Permasalahan integrasi Timor Timur mulai muncul ke permukaan setelah terjadi peristiwa "Kerusuhan Santa Cruz Dilli" pada 12 November 1991. Demo di Dilli dilakukan berkaitan dengan terbunuhnya seorang aktivis kemerdekaan

⁶⁷ Robert Lawless, "The Indonesian Takeover of East Timor," *University of California: Asian Survey*, vol. 16, no. 10 (October 1976): 950., 2 December 2009, hlm. 983.

⁶⁸ "Permasalahan Integrasi Timor Timur," *IMET Timor 1971-2000* (Jakarta: Ditjen Pendidikan

Timor Timur yang dimakamkan di pemakaman Santa Cruz sebulan sebelumnya serta rencana kunjungan Parlemen Portugal yang batal karena adanya keberatan dari pemerintah Indonesia. Demo ini kemudian dihentikan oleh aparat keamanan yang dilakukan secara represif. Kerusuhan ini membawa korban 251 orang meninggal, 382 orang terluka, dan 250 orang menghilang. Masalahnya adalah bahwa peristiwa ini disaksikan oleh dua wartawan Amerika, Amy Goodman dan Allan Nairn dan direkam dalam pita video oleh Max Stahl untuk stasiun televisi *Yorkshire* di Inggris. Video tersebut selanjutnya digunakan dalam pembuatan sebuah film dokumenter *First Tuesday* berjudul *In Cold Blood: The Massacre of East Timor*, dan ditayangkan di ITV Inggris pada Januari 1992. Pada dasarnya peristiwa ini merupakan letupan pertama dimana permasalahan integrasi Timor Timur menarik perhatian komunitas internasional, karena tayangan tersebut kemudian disiarkan ke seluruh dunia. Tentunya letupan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Permasalahan integrasi Timor Timur sendiri pada dasarnya memang belum diakui oleh PBB yang mewakili komunitas internasional. Akan tetapi masalah ini mampu bertahan sekian lama sekalipun ditentang PBB. Tentunya semua ini tidak luput dari pengaruh kuat yang dipancarkan oleh Amerika sebagai salah satu *super power*, sementara Australia pada saat itu juga tidak terlalu mempersoalkannya, karena adanya kepentingan dengan Indonesia tentang deposit minyak bumi di salah Timor. Dari kecamatan ini terlibat jelas bahwa

dukungan Amerika telah mampu meredam persoalan integrasi Timor Timur kedalam NKRI dari sorotan internasional.⁶⁹

C. Masa Embargo Militer Amerika Serikat (1999-2005)

Dalam perniagaan dan politik internasional, embargo merupakan pelarangan perniagaan dan perdagangan dengan sebuah negara. Embargo umumnya dideklarasikan oleh sekelompok negara terhadap negara lain untuk mengisolasiannya dan menyebabkan pemerintah negara tersebut dalam keadaan internal yang sulit. Keadaan yang sulit ini dapat terjadi akibat pengaruh dari embargo yang menyebabkan ekonomi negara yang dilawan tersebut menderita karenanya. Embargo juga digunakan sebagai hukuman politik bagi pelanggaran terhadap sebuah kebijakan atau kesepakatan, seperti yang diterapkan Amerika Serikat terhadap Indonesia dari tahun 1999 hingga 2005 dalam hal pengadaan senjata militer akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di Timor Timur (Timtim).⁷⁰

Letupan Timtim yang pertama disusul oleh letupan kedua yang tidak kalah dahsyat, yaitu serangan milisi pro-integrasi yang ditenggarai memperoleh dukungan ABRI saat itu terhadap kelompok orang yang menginginkan kemerdekaan Timtim, yang telah menjadi korban pasca jajak pendapat tahun 1999. Dunia benar-benar terguncang, dan perjuangan diplomasi Ramos Horta

⁶⁹ Daftar bantuan Militer Amerika Serikat kepada Indonesia dan Timor-timur, <http://etan.org/news/2007/milglossarybh.htm>, diakses tanggal 14 Agustus 2012.

⁷⁰ Jaleswari Pramodhawardani, "Indonesia dan Embargo Amerika", Selasa, 3 Agustus 2010, <http://www.majalah.com/read/online/2010/08/03/54/indonesia>, diakses tanggal 14 Agustus

yang didukung oleh *East Timor and Indonesia Action Network* (ETAN) akhirnya mampu menembus Kongres AS. Presiden Clinton tidak berdaya menghadapi desakan masyarakatnya sendiri dan komunitas dunia. Embargo diumumkan, seluruh bentuk U.S. *Security Assistance* kepada Indonesia dihentikan. Amerika memberlakukan embargo militer penuh terhadap TNI. Kerusuhan berdarah pasca jajak pendapat di Timor Timur membuat Kongres AS pada tahun 1999 mengeluarkan *Leahy Amendment*, yang berisi embargo total. Inti amandemen itu adalah mensyaratkan bahwa bantuan militer AS kepada Indonesia dapat diberikan oleh pemerintah AS bila pemerintah RI dapat mengadili para pelaku pelanggaran HAM di Timor Timur.⁷¹

Dengan pemungutan suara, *Congress* Amerika Serikat membatasi pemberian *International Military Education and Training* (IMET) (Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional) kepada Indonesia sebagai tanggapan terhadap peristiwa pembantaian 270 penduduk sipil oleh tentara Indonesia dengan senjata otomatis M-16 yang disediakan oleh Amerika Serikat pada tanggal 12 Nopember 1991 di Santa Cruz (Pembantaian di Santa Cruz). Hubungan militer semakin dibatasi sampai semua jalinan militer dengan Indonesia diputuskan pada bulan September 1999 ketika militer Indonesia dan milisi kaki-tangannya menyerbu Timor Timur. Segera setelah itu, *Congress* melarang program pembiayaan militer asing dan semua program IMET sampai sejumlah persyaratan dipenuhi, antara lain mewajibkan pemerintah Indonesia

untuk melakukan penuntutan hukum dan menjatuhkan hukuman atas para anggota angkatan bersenjata yang terbukti bersalah karena melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan karena memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok milisi. Selanjutnya, *Congress* juga membatasi ekspor peralatan pertahanan dan keamanan klasifikasi “mematikan” ke Indonesia. Akan tetapi, sejak menduduki jabatan, Presiden Bush telah melakukan upaya-upaya untuk membuka pembatasan legislatif dari *Congress* tersebut. Hal mana berhasil dilakukan sepenuhnya di tahun 2006, ketika semua pembatasan yang tersisa dihapuskan.⁷²

Peristiwa ini mendorong Departemen Pertahanan AS langsung menghentikan program pendidikan dan latihan militer internasional untuk para perwira Indonesia dalam bentuk program IMET yang dulu telah disepakati. Keputusan penghentian program IMET ini dihasilkan dalam sidang pleno aprosiasi bantuan luar negeri tanggal 25 Juni 1992.⁷³ Sanksi kepada Indonesia juga diberikan pada bulan Juli 1993 dimana *Congress* AS melakukan veto atas penjualan pesawat tempur F-5 buatan AS dari Yordania kepada Indonesia. AS juga melarang berbagai jenis senjata dalam klasifikasi mematikan atau *lethal-weapons* yang dapat digunakan oleh pasukan pengendali massa apabila terjadi demonstrasi dan kerusuhan. Ketidakharmisan hubungan militer kedua negara,

⁷² Daftar bantuan Militer Amerika Serikat kepada Indonesia dan Timor-timur, <http://etan.org/news/2007/milglossarybh.htm>, diakses tanggal 14 Agustus 2012.

⁷³ Cipto, Bambang, *Tekanan Amerika Terhadap Indonesia: Kajian atas Kebijakan Luar Negeri* (Jakarta: Puslitbang, 1998), hlm. 128.

semakin memburuk setelah Indonesia mengundurkan diri dari keikutsertaan dalam program E-IMET (*Expended International Military Education Training*) yang merupakan bagian dari keseluruhan program IMET. Di saat yang bersamaan tanggal 6 Juni 1997, Indonesia menyatakan pembatalan rencana pembelian pesawat tempur F-16 dari AS karena merasa AS terlalu mencamuri urusan politik dalam negeri Indonesia khususnya terkait masalah Timor Timur.

Letupan kasus Timor-Timur yang pertama, disusul oleh letupan kedua yang tidak kalah dahsyat, yaitu serangan milisi pro-integrasi pada kelompok pro-kemerdekaan, yang ditengarai memperoleh dukungan ABRI pada saat itu. Upaya diplomasi Ramos Horta yang didukung oleh *East Timor and Indonesia Action Network* (ETAN) akhirnya sampai pada Kongres AS. Presiden Clinton tidak berdaya menghadapi desakan masyarakat AS dan komunitas dunia, sehingga Kongres AS mengumumkan embargo militer secara penuh pada September 1999. Keputusan ini berisi penghentian seluruh bentuk *U.S. security assistance* kepada Indonesia dan memberikan persyaratan bahwa bantuan militer AS dapat kembali diberikan oleh Pemerintah AS bila Pemerintah RI dapat mengadili para pelaku pelanggaran HAM di Timor Timur.⁷⁴

⁷⁴ Jaleswari Pramodhawardani, "Indonesia dan Embargo Amerika", Selasa, 3 Agustus 2010, <http://stratagem.com/read/analisa/2010/08/03/54/indonesia>, diakses tanggal 14 Agustus 2010.

Selain keputusan tersebut, AS juga mengajukan beberapa persyaratan diantaranya:

1. Kerjasama AS-Indonesia dalam menghadapi terorisme.
2. Akuntabilitas atas kejahatan di Timor Timur.
3. Transparansi anggaran keuangan militer.

Persyaratan yang diajukan tersebut di atas menjadi syarat mutlak yang diajukan oleh Kongres AS untuk membatalkan embargo militer terhadap Indonesia. Jika Indonesia tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Kongres AS akan terus menerapkan embargo militer terhadap Indonesia.

Dampak embargo AS atas perangkat militer yang berkategori mematikan (*lethal weapon*) sejak tahun 1999 cukup menyulitkan Indonesia. Berbagai pesawat tempur TNI Angkatan Udara (TNI AU) terpaksa digudangkan. Mobilitas pasukan, khususnya Angkatan Darat (AD), menjadi amat terbatas karena kekurangan suku cadang alat transportasi. Pendeknya, pemerintah mendapat kesulitan dalam memenuhi kekuatan minimal (*minimum essential force*) yang dibutuhkan TNI.

Semenjak diberlakukan embargo militer terhadap Indonesia, kondisi perlengkapan militer Indonesia jauh di luar kemampuan yang seharusnya. Meskipun demikian Indonesia tetap berusaha menunjukkan kekuatan militer dengan mengadakan pameran dagang Internasional terbesar berbagai jenis industri pertahanan yaitu "Indo Defence 2004 Expo & Forum" pada tanggal 24-

Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Polandia, Jerman, Belanda, Russia, Perancis, Kanada dan lain-lain. Pameran ini menunjukkan pada dunia bahwa militer Indonesia masih memiliki kekuatan. Tujuan lainnya adalah dapat terjalinnya kerjasama militer Indonesia dengan negara produsen produk militer selain AS.

Ditariknya dukungan AS terhadap Timor Timur, tidak terlepas oleh adanya benturan kepentingan antara kedua belah pihak. Benturan kepentingan tersebut antara lain disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan global AS pasca berakhirnya Perang Dingin, dimana bagi AS, komunis bukan lagi merupakan ancaman. Sementara bagi Indonesia komunis tetap menjadi ancaman nyata yang harus terus diperangi. Paska Perang Dingin, AS berada di bawah kepemimpinan Bush dan penggantinya Clinton menerapkan doktrin *Liberal Democratic Internationalism* yang selaras dengan paham Wilson. Orientasi kebijakan luar negeri AS berpusat pada kepentingan nasional yang mendasar atau mutlak yaitu keamanan nasional yang dikombinasikan dengan kepentingan nasional vitalnya yaitu pembangunan ekonomi. Dalam implementasinya terkait dengan penyebaran demokrasi, AS sangat memperhatikan kebebasan individu melalui penghormatan terhadap HAM sehingga langkah pemerintah AS menekan Indonesia tidak terlepas dari kondisi tersebut. Tentunya kebijakan ini tidak akan diambil, andai kata persoalan ini masih dalam konsteks Perang Dingin, dimana AS menerapkan doktrin pembendungan. Dengan demikian bahwa momentum lenasnya Timor

Timur dari NKRI terjadi karena adanya perubahan kebijakan luar negeri AS dalam percaturan global.

Era pasca Perang Dingin juga disebut sebagai era *neoliberalism* atau era kebangkitan kembali *Wilsonian Liberalism* sebagai alat diplomasi hubungan bilateral dan multilateral dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak azasi manusia.

*“Neoliberals have recently given great emphasis to bilateral and multilateral diplomacy for promotion and protection of human rights. They have brought the topic of humanitarian intervention into spotlight ... This, too, returns inquiry to focus on concerns central to idealists in the liberal tradition of Wilson.”*⁷⁵ (Neoliberal baru-baru ini memberikan penekanan kepada diplomasi bilateral dan multilateral untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia. Mereka telah membawa topik intervensi kemanusiaan menjadi sorotan ... ini juga, kembali penyelidikan untuk fokus pada kekhawatiran pusat idealis dalam tradisi liberal Wilson).

D. Pencabutan Embargo Militer

Penandatanganan Undang-Undang Apropriasi HR 3067 oleh Presiden Amerika Serikat George Walker Bush pada tanggal 14 November 2005, menandai pencabutan embargo militer atas Indonesia sekaligus menjadi babak baru hubungan militer AS dengan Indonesia. Keputusan ini hanya bersifat sementara dan akan dievaluasi setiap tahunnya, namun hal tersebut membuka kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan kemampuan alutsista yang dimiliki, terutama dalam hal pengadaan suku cadang peralatan tempur dan persenjataan utama yang bersumber dari AS maupun kerjasama militer dalam

⁷⁵ Kegley, Charles W., 1995, *Controversies in International Relations Theory: Realism and Neoliberal Challenge*. New York: St. Martin's Press, hlm. 14.

berbagai bentuk yang sebelumnya ditutup.⁷⁶ Namun, saat itu Kongres AS tetap menolak pencabutan embargo militer, karena pada saat yang bersamaan pengadilan Ad-Hoc memutus bebas Jenderal Wiranto. Jenderal Wiranto diduga oleh pemerintah AS sebagai dalang dari pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur. Keputusan Pengadilan Ad-Hoc ini dinilai tidak adil, karena Jenderal Wiranto sedang menjabat sebagai Panglima TNI yang memegang komando tertinggi di tubuh TNI. Meski Kongres AS tetap menentang pencabutan embargo militer terhadap Indonesia, namun pemerintah Presiden George Walker Bush melalui Menlu AS tetap memutuskan mencabut embargo militer tersebut dengan mengesampingkan persyaratan yang ditetapkan oleh Kongres AS tersebut.

Pencabutan embargo militer oleh Pemerintah AS didasarkan pada beberapa alasan antara lain:

1. Serangan teroris terhadap WTC pada 11 September 2001
2. Keamanan aset ekonomi AS di Indonesia
3. Penurunan nilai ekspor senjata AS ke Indonesia
4. Kemenangan SBY dalam pemilihan Presiden tahun 2004
5. Peran penting Indonesia di kawasan ASEAN

Pasca embargo, hubungan *mil-to-mil* Indonesia–Amerika Serikat telah dipulihkan kembali, dan barang-barang eks embargo yang selama ini tertahan di

⁷⁶ Mufti makaarim dan Al A'raf, *Catatan Monitoring Reformasi TNI 1 Tahun Pasca Pencabutan Embargo Militer Amerika Serikat*, 22 Oktober 2007, <<http://makaarim.wordpress.com/2007/10/22/catatan-monitoring-reformasi-tni-1-tahun-paska-embargo-militer-amerika-serikat/>> diakses tanggal 14 Agustus 2012

Amerika Serikat, telah memperoleh kemudahan untuk dikirim ke Indonesia (sedang dalam proses). Sementara Indonesia (TNI AU) telah diijinkan kembali membuka kontrak pengadaan suku cadang alutsista TNI secara *G to G* melalui FMS (*Foreign Military Sales*) dengan telah diterbitkannya beberapa LOA (*Letter of Offer and Acceptance*) baru. Demikian pula dengan bantuan pendidikan melalui program IMET.⁷⁷

Dengan berakhirnya embargo militer yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Indonesia ditandai dengan pengumuman yang dilakukan oleh Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Richard Boucher pada tahun 2005 yang menyatakan pemerintah Amerika Serikat akan mencabut semua embargo militer terhadap Indonesia dan melakukan normalisasi hubungan kerja sama dalam bidang keamanan dimana Amerika Serikat akan membuka kembali perdagangan alutsista kepada Indonesia dengan syarat para anggota militer yang terlibat harus dihukum. Alasan lain pembukaan hubungan militer ini ialah pemerintah Amerika menganggap Indonesia merupakan mitra penting untuk melakukan perang terhadap terorisme yang menjadi salah satu fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada waktu itu. Dibukanya kembali hubungan kerja sama Alutsista Amerika dan Indonesia dimulai dengan pada tahun 2006 pengembalian satu unit pesawat tempur F-5 Tiger TNI AU yang sempat tertahan di Amerika Serikat untuk dimodernisasi.

⁷⁷ *International Military Education and Training*) yang juga telah dipulihkan, <http://www.dpr.go.id/assets/berkas/kunjunganKerjaKomisi/Negara%20Amerika%20Serikat_LAPORAN%20DELEG

Kerja sama terus berlanjut dalam proses normalisasi, sebelum pencabutan embargo ini Amerika Serikat sudah memberikan 16 unit radar tempur AN/APG untuk 16 Hawk 209 milik TNI AU pada tahun 1999 sampai 2007 namun sempat terhenti pula oleh embargo yang dijatuhkan.

Kerja sama dalam bidang alutsista dengan Amerika Serikat cenderung lancar ketika Presiden Republik Indonesia dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono antara Indonesia dan Amerika sepakat untuk mengadakan suatu kemitraan komperhensif yang diusulkan oleh Presiden Yudhoyono pada tahun 2008 dan terwujud pada tahun 2011, salah satu isi pilar kemitraan komperhensif tersebut ialah komitmen kerjasama dalam waktu yang panjang dalam bidang politik dan keamanan. Di dalam bidang pertahanan kerja sama tersebut terwujud berupa Amerika Serikat menjual 27 unit helikopter angkut taktis Bell-412EP yang dirakit di PT. Dirgantara Indonesia dan diterima mulai tahun 2012. Tidak sampai di situ, pemerintah Amerika Serikat juga menawarkan hibah 24 unit F-16 C yang *diupgrade* menjadi block 32 untuk melengkapi pesawat tempur veteran Indonesia yang telah ada saat ini. Program hibah F-16 ini penting mengingat kondisi F-16 TNI AU yang ada saat ini spesifikasinya di bawah pesawat hibah yang akan di modernisasi ini yakni TNI harus memiliki 10 unit F-16 A/B block 15

yang di beli pada tahun 1986, biaya modernisasi ini di perkirakan berada di kisaran 760 juta dolar AS.⁷⁸

Kerjasama keamanan yang akan dibahas kembali setelah lepasnya embargo tersebut adalah terutama dalam penanganan terorisme, pengamanan Selat Malaka dan keamanan kawasan Asia Tenggara, semua itu akan dibahas dalam *Mini Dialogue IUSSD (Indonesian-United State Security Dialogue)* di Jakarta, pada 20 Januari 2006 (*mini dialogue IUSSD* di Jakarta, akan menjadi bahan dalam pertemuan IUSSD keempat di Amerika Serikat pada Mei 2006). Kerjasama pertahanan dan keamanan Indonesia dan Amerika Serikat melalui IUSSD diaplikasikan melalui dialog, latihan bersama dan bantuan militer sehingga memberikan pengaruh terhadap peningkatan kapabilitas Tentara Nasional (TNI) yaitu sebagai berikut:

1. Dialog yang dilaksanakan Indonesia dan Amerika Serikat merupakan langkah kedua negara untuk melanjutkan kerjasama yang terhenti sejak peristiwa di Santa Cruz, Timor Timur pada tahun 1991. Dialog ini bertujuan membangun suatu saluran komunikasi dua arah antar Departemen Pertahanan dan institusi militer kedua negara, menciptakan sarana kepada pejabat pemerintah kedua negara, menciptakan sarana kepada pejabat pemerintah kedua negara untuk dapat saling bertukar pandangan dalam lingkup yang luas mengenai strategi keamanan

⁷⁸ *Kerjasama Pertahanan Indonesia dengan Negara-Negara Asia Pasifik Paska Embargo AS*, <<http://lembagakeris.net/2012/05/kerja-sama-pertahanan-indonesia-dengan-negara-negara-asia-pasifik->

nasional dan pertahanan, adanya pemahaman yang lebih dalam tentang persepsi, konsepsi bahkan mengenai strategi keamanan nasional kedua negara, dan menghasilkan masukan-masukan yang positif bagi pemerintah masing-masing sebagai bahan untuk menentukan kebijakan politik selanjutnya.

2. Latihan bersama merupakan salah satu realisasi dari dialog yang diadakan Indonesia dan Amerika Serikat, latihan bersama ini membantu meningkatkan kemampuan teknis personil TNI. Indonesia juga mengikuti latihan bersama dengan peserta negara lain yang diadakan Amerika Serikat, latihan tersebut meliputi latihan kesigapan dan kerjasama di laut, latihan bantuan bencana alam.
3. Bantuan militer merupakan realisasi yang diberikan kepada militer Indonesia. Militer Indonesia mendapatkan dana bantuan dari Amerika Serikat melalui program IMET dan FMF. Dana bantuan militer ini dipergunakan untuk mendukung proses pendidikan personil TNI dan pembelian perlengkapan militer, meskipun bantuan militer melalui kedua program ini pernah dihentikan, tetapi pada tahun 2002 bantuan militer melalui program IMET dipulihkan kembali dan pada tahun 2006 bantuan militer melalui program FMF dibuka kembali.
4. Kerjasama Amerika Serikat-Indonesia melalui *Indonesia-U.S. Security Dialogue (IUSSD)* yang diadakan semenjak tahun 2002 sampai 2008 menjadi usaha kedua negara untuk saling bertukar pandangan dan

informasi seputar masalah keamanan untuk menentukan langkah kebijakan politik selanjutnya. Dialog ini rutin diadakan oleh kedua negara setahun sekali dengan lokasi dan waktu yang bergantian.

5. Untuk meningkatkan kapabilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI), Indonesia memanfaatkan hubungan yang telah terjalin dengan Amerika Serikat dengan mengadakan kerjasama antar institusi militer yaitu dengan mengadakan dialog keamanan, yang selanjutnya diaplikasikan dalam program latihan bersama dengan militer Amerika Serikat dan bantuan militer yang diberikan terhadap TNI dari Amerika Serikat. Hal tersebut menjadi pendorong bagi TNI untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam pertahanan dan keamanan.

Selain *mini dialogue IUSSD*, kedua negara juga akan melakukan *mini dialogue US-Indonesian Bilateral Defence Dialogue (USIBDD)*. Dalam dalam payung USIBDD yang dimulai sejak 1997 terbentuk program kerjasama militer antara TNI dan *US Pacific Command (US PACOM)*. Namun sempat dihentikan pada 2002 bersamaan dengan embargo yang diberlakukan AS terhadap Indonesia.

Kerjasama antara TNI dan US PACOM ini adalah bagian dari *Training and Excercise Working Group (TEWG)* yang merupakan bagian USIBDD yang telah kembali berjalan mulai 2004 setelah sebelumnya sempat dibekukan pada 1997.

Untuk 2005, US PACOM menawarkan sekitar 108 program pelatihan dan diikuti oleh yang dikenal *Subject Matters Expert Exchanges (SMEE)* untuk

masing-masing angkatan kedua negara. Namun, dari 108 program yang ditawarkan, TNI hanya mengambil 80 program disesuaikan dengan kepentingan nasional Indonesia. Selain US PACOM, Amerika Serikat dengan keunggulan teknologi militer terkemuka di dunia juga memberi kontribusi yang besar terhadap Indonesia antara lain melalui kerjasama pendidikan dalam wadah internasional yang dibentuk Amerika Serikat seperti *International Military Education and Training (IMET)*, *Foreign Military Sales (FMS)* yang melibatkan negara-negara lainnya di dunia, maupun dalam bentuk latihan antar matra kedua negara. Kerjasama di bidang pertahanan dan militer seperti tersebut penting artinya bagi pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia yang kuat dan profesional tidak saja untuk kepentingan Indonesia, tetapi juga untuk kepentingan kawasan.⁷⁹

E. Kerjasama Pertahanan dan Keamanan Indonesia dan Amerika Serikat Melalui IUSSD

Dalam tahun-tahun terakhir hubungan kerjasama pertahanan Indonesia-AS meningkat cukup signifikan, baik di bidang pendidikan dan latihan bersama antar Angkatan Bersenjata terutama Angkatan Laut kedua negara, maupun dalam bidang pengadaan Alutsista. *Indonesia-United States Security Dialogue (IUSSD)* yang dilaksanakan kedua negara merupakan forum yang sejak dibentuk hingga kini memberi kontribusi penting dalam membangun kerjasama pertahanan.

⁷⁹ Kapten Arm Oke Kristiyanto, S.AP, *Lesson Learned dari Pelatihan Interoperability dan Interagency melalui Command Post Exercise Garuda Shield*, < <http://www.tandef.net/lesson-learned->

Forum dialog tersebut memiliki nilai yang sangat strategis tidak saja bagi kedua negara, tetapi dalam lingkup yang lebih luas bermanfaat dalam menghadapi isu-isu keamanan global dan regional. Salah satu hasil dari IUSDD adalah pembentukan forum bilateral antar angkatan bersenjata yakni *United States-Indonesia Bilateral Defence Dialogue* (USIBDD). USIBDD tersebut semakin menunjukkan kinerjanya dari tahun ke tahun yang ditunjukkan oleh kegiatan-kegiatan yang disepakati kedua angkatan bersenjata yang terus meningkat setiap tahun baik dari segi jumlah kegiatan maupun bobotnya. Berikut ini merupakan rangkaian kerjasama IUSDD antara Indonesia dengan Amerika Serikat:

1. *Indonesia-U.S. Security Dialogue* (IUSDD) ke I

IUSDD ke I dilaksanakan tanggal 24–25 April 2002 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta. Hasil pertemuan IUSDD pertama ini antara lain kedua negara sepakat meningkatkan komunikasi antar institusi pertahanannya dan sepakat untuk mengedepankan kerjasama bilateral atau multilateral dalam melawan terorisme (Ditkorsin Ditjen Strahan, November 2008). Sebagai penutup pertemuan, delegasi kedua negara sepakat bahwa dialog sangat penting artinya sebagai pilar bertumpunya hubungan antar Indonesia dan AS. Disamping itu juga disepakati untuk meningkatkan frekuensi komunikasi antara Menteri Pertahanan kedua negara dan juga antara perwakilan masing-masing Menhan. Delegasi kedua negara juga sepakat untuk melaksanakan IUSDD II pada pertengahan tahun 2003.

2. *Indonesia-U.S. Security Dialogue* (IUSDD) ke II

IUSSD ke 2 dilaksanakan pada tanggal 22-23 April 2004 di Departemen Pertahanan AS, Pentagon, Washington D.C, Amerika Serikat. Hasil pertemuan IUSSD kedua ini antara lain:

- a. Sepakat untuk lebih memperhatikan denuklirisasi di Semenanjung Korea
- b. Kerjasama pertahanan dan keamanan Amerika Serikat dan negara ASEAN
- c. Masalah Timor Leste
- d. Sepakat untuk mempromosikan HAM
- e. Sepakat membentuk BDD (*Bilateral Defence Dialogue*) antara US PACOM dan TNI
- f. Memberikan status diplomatik bagi NAMRU (*Naval Medical Research Unit*)
- g. Normalisasi hubungan militer Indonesia-AS:
 - 1) Pengembalian peralatan militer Indonesia yang ada di gudang AS
 - 2) Permohonan untuk membeli 50 pucuk senjata *M16*
 - 3) Permohonan untuk mengikuti seminar *Peace Keeping Operations* (Ditkersin Ditjen Strahan, November 2008).

Mengakhiri pertemuan, kedua delegasi sepakat bahwa IUSSD III akan dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2005.

3. *Indonesia-U.S. Security Dialogue* (IUSSD) ke III

IUSSD ke 3 dilaksanakan pada tanggal 2-3 Agustus 2005 di Timor Room Hotel Borobudur Jakarta Indonesia. Hasil pertemuan IUSSD ketiga

- a. AS tidak akan menyerang Korea Utara dengan kekuatan militer.
- b. Bila dibutuhkan, negara Asia Tenggara diberikan bantuan.
- c. Menciptakan kesempatan strategis untuk memperkuat hubungan RI-AS.
- d. Bekerjasama dalam memberantas kejahatan lintas batas.
- e. Melaksanakan kembali program *Foreign Military Sales (FMS)*, *Foreign Military Financing (FMF)* dan *International Military Education and Training (IMET)*.
- f. Dukungan terhadap integritas teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ditkersin Ditjen Strahan, November 2008).

Kedua delegasi sepakat untuk melaksanakan IUSSD IV pada tahun 2006 di Washington D.C atau Honolulu. Pihak AS menginginkan pelaksanaan IUSSD IV selama dua hari penuh guna memperbanyak waktu untuk melakukan tanya jawab.

4. *Indonesia-U.S. Security Dialogue (IUSSD) ke IV*

IUSSD ke 4 di Washington DC yang dilaksanakan tanggal 24-25 April 2006, serta acara pokok IUSSD-IV yang berlangsung selama dua hari yakni tanggal 26 – 27 April 2006 bertempat di *National Defence University* Washington D.C Amerika Serikat. Hasil pertemuan IUSSD keempat ini antara lain:

- a. Peningkatan hubungan kedua negara yang pesat dan membaik.
- b. Mempertahankan pencabutan restriksi penjualan senjata kategori *lethal*

- c. Partisipasi Indonesia dalam program *International Military, Educational and Training* (IMET) akan terus dilanjutkan guna penguatan usaha-usaha dalam mewujudkan TNI yang profesional sesuai prinsip-prinsip negara demokrasi.
- d. Berkomitmen untuk memelihara kesinambungan persahabatan antara Indonesia dan AS.
- e. Tahun Anggaran 2006 telah tersedia dana untuk membantu Indonesia membeli peralatan atau pelatihan sekitar \$US 1 M untuk TNI melalui program FMF (Ditkersin Ditjen Strahan, November 2008).

Sebagai penutup, kedua delegasi sepakat untuk menyelenggarakan IUSSD V pada tahun 2007 di Indonesia dan sepakat untuk mengadakan serta melanjutkan kontak-kontak lebih lanjut pada tingkat Menteri dan pejabat yang mewakili.

5. *Indonesia-U.S. Security Dialogue* (IUSSD) ke V

IUSSD ke 5 dilaksanakan pada tanggal 18-19 April 2007, di Dephan, Jakarta, Indonesia. Hasil pertemuan IUSSD kelima ini antara lain:

- a. Memperbaiki pemahaman, posisi, persepsi dan kebijakan masing-masing negara dalam isu-isu keamanan di tingkat regional dan internasional untuk meminimalisir kesalahpahaman yang mungkin terjadi antara kedua belah pihak.
- b. Kerjasama multilateral, regional dan bilateral untuk menangani masalah global terorisme, HIV/AIDS, pandemik flu burung, *transnational crime*

persons trafficking, drug trafficking, keamanan maritim, *illegal logging* dan konflik wilayah.

- c. Berbagi informasi dengan negara lain mengenai isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.
- d. Peningkatan hubungan yang diimplementasikan dalam program-program yang dilaksanakan.
- e. Sepakat USIBDD merupakan implementasi dari IUSSD yaitu kerjasama *military to military* antara TNI dan US PACOM (Ditkersin Ditjen Strahan, November 2008).

Sebagai penutup, kedua delegasi sepakat untuk menyelenggarakan IUSSD VI pada tahun 2008 di Hawaii, Amerika Serikat.

6. *Indonesia-U.S. Security Dialogue (IUSSD) ke VI* .

IUSSD ke 6 dilaksanakan di Washington D.C pada tanggal 15-16 April 2008 oleh perwakilan dari delegasi Indonesia dan delegasi Amerika Serikat.

Hasil pertemuan IUSSD keenam ini antara lain:

- a. Sepakat untuk lebih memperhatikan kehadiran China sebagai aktor global.
- b. Tidak akan menurunkan bobot dan kualitas kegiatan dan kerjasama.
- c. Penyusunan MoU Kerja Sama Aktivitas Pertahanan (dalam bentuk naskah *non-paper*).
- d. Penguayaan peluang untuk memberikan mekanisme bantuan alat angkut

- e. Merintis kerjasama antara Indonesia-AS dalam proses pendirian dan pengembangan *Indonesia Defense University* (IDU).
- f. Peningkatan partisipasi dalam misi-misi PBB.
- g. Mempertahankan keberlanjutan kerjasama melalui IMET, FMF dan FMS (Ditkersin Ditjen Strahan, November 2008).

Kedua delegasi sepakat untuk melaksanakan IUSSD VII tahun 2009 di Jakarta, serta melanjutkan kontak-kontak lebih lanjut antar Menteri dan pejabat yang mewakilinya.

Menteri Pertahanan AS Leon Panetta mengatakan AS akan melanjutkan kerjasama militer dengan Indonesia, tetapi Washington menyatakan akan tetap mengawasi dengan seksama terkait dengan isu pelanggaran hak asasi manusia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan reformasi TNI dengan ilustrasi Papua kepada Menhan AS, Leon Panetta, kata jubah presiden Teuku Faizasyah kepada Liston Siregar. Leon Panetta mengatakan pertemuan tertutup antara dirinya dengan Menhan Purnomo Yusgiantoro berfokus pada "Perkembangan penting Indonesia sebagai pemimpin global dan komitmen jangka panjang AS untuk keamanan dan kemakmuran kawasan ini."

Hubungan militer Indonesia dengan AS sempat dibekukan selama lebih dari 12 tahun saat Presiden Soeharto berkuasa hingga 1998. Pasukan Komando Khusus, TNI Angkatan Darat, Kopassus dituduh AS melakukan pelanggaran HAM di Papua, Timor Timur, dan Aceh semasa pemerintahan Soeharto. Hubungan militer Indonesia dengan AS kembali dibuka pada tahun 2010, saat Menteri Pertahanan AS dipimpin

oleh Robert Gates. Seorang pejabat pertahanan senior yang datang bersama Panetta mengatakan kerjasama yang awalnya difokuskan pada pelatihan perwira TNI sekarang akan diperluas menjadi tingkat operasional, termasuk pelatihan hak asasi manusia. Saat berkunjung ke Bali, Panetta juga bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum melanjutkan kunjungan ke Jepang Senin 24/10 2011 dan Korea Selatan Rabu, 26/10 2011.⁸⁰

Dalam kunjungannya ke Indonesia pada tanggal 13 Februari 2012, Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk bidang politik-militer Andrew Saphiro memaparkan tiga prioritas bidang kerja sama pertahanan. Hal ini guna menguatkan kerja sama kedua negara, yang tidak hanya terfokus pada kerja sama ekonomi dan misi perdamaian. Dalam upacara peletakkan batu pertama di barak perdamaian yang berlokasi di kawasan Sentul, Bogor. Wamenlu AS Andrew Saphiro menegaskan, kemitraan kedua negara tidak hanya berfokus dalam bidang perdamaian. Wamenlu AS Andrew Saphiro menyatakan;

"Ada beberapa prioritas kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan yang tengah diupayakan oleh AS-Indonesia. Pertama tentunya dalam misi perdamaian dunia, kedua dalam bidang pertahanan dan keamanan maritim, dan yang ketiga dalam bidang penanggulangan bencana dan kemanusiaan serta peningkatan profesionalisme secara keseluruhan".

Lebih lanjut Wamenlu AS Andrew Saphiro menjelaskan, AS juga membantu Indonesia dalam memenuhi kebutuhan militer Indonesia seperti misalnya, bulan

⁸⁰ "AS Lanjutkan Kerjasama Militer dengan Indonesia", http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/10/111023_panettabali.shtml diakses pada

lalu AS-Indonesia telah menandatangani kesepakatan terkait pembelian jet tempur F16. Dalam kesempatan yang sama, Wamenlu AS Andrew Saphiro juga menegaskan, Indonesia merupakan mitra penting bagi AS di kawasan Asia. Berdasarkan alasan itulah kedua negara akan terus mencari ruang untuk menjalin kerja sama.⁸¹

Kerjasama keamanan RI – AS dikukuhkan melalui penandatanganan *LoI between INP and FBI on Mutual Cooperation in Capacity Building and Combating Transnational Crimes* pada bulan Maret 2011 yang melandasi kerjasama Badan Penyelidik Federal (FBI) AS dengan Polri (Densus 88) dalam pemberantasan terorisme. Sebelumnya, pada tanggal 8 November 2010 telah ditandatangani *MoU between the Government of the United States of America and the Republic of Indonesia on Capacity Building to Strengthen the Security of Biological Pathogens* yang menjadi landasan kerjasama pelatihan *capacity building* di bidang *biosecurity* dan *biosafety* guna memperkuat keselamatan laboratorium dan keamanan patogen dari akses ilegal.

⁸¹ RI-AS Prioritaskan 3 Bidang Kerjasama Pertahanan,
<<http://international.okezone.com/read/2012/02/13/411/574883/ri-as-prioritaskan-3-bidang-kerja->